

BAB II

MANAJEMEN DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN

A. Konsep Dasar Manajemen.

1. Pengertian Manajemen.

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Latin yaitu asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke Bahasa Inggris *to manage* (kata kerja), *management* (kata benda), dan *manager* untuk orang yang melakukannya. *Management* diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi manajemen (pengelolaan).¹

Manajemen menurut Parker dalam Husaini Usman adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*the art of getting things done through people*).² Menurut Husaini Usman Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (P3) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam arti sempit adalah manajemen sekolah/madrasah yang meliputi: perencanaan program sekolah/madrasah, pelaksanaan program sekolah/madrasah, kepemimpinan kepala sekolah/madrasah, pengawas/evaluasi, dan sistem informasi sekolah/madrasah.³

¹ Husaini Usman, *Manajemen: Teori Praktik dan Riset pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 6.

² Husaini Usman, *Manajemen*, hlm. 6.

³ Husaini Usman, *Manajemen*, hlm. 6.

Menurut Terry yang dikutip oleh Sukirman memberikan definisi sebagai berikut: “*managemen is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources*”⁴. Maksudnya manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber manusia dan sumber lain.

Muhaimin, et. al., menjelaskan bahwa manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.⁵ Sondang P. Siagian dalam Arikunto menjelaskan bahwa manajemen adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.⁶ Sedangkan menurut Harold Koonz manajemen meliputi: *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*.⁷

Manajemen menurut Nanang adalah: (1) manajemen sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki serangkaian teori yang menuntut manajer untuk melakukan tindakan pada situasi tertentu dan meramalkan akibat-

⁴ Sukirman, “Manajemen Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malang”(Tesis) (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2010),hlm.38-39. http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=08710030 (diakses 20 April 2014).

⁵ Muhaimin, et. al., *Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4.

⁶ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Adtya Media, 2008), hlm. 3.

⁷ Burhanuddin: *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 32-35.

akibatnya, (2) manajemen merupakan suatu kiat atau seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang, yang membutuhkan tiga unsur yaitu pandangan, pengetahuan, teknis dan komunikasi, (3) manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut persyaratan tertentu seperti: (a) kemampuan/kompetensi meliputi konseptual, sosial dan teknis, (b) kemampuan konsep adalah kemampuan mempersepsi organisasi sebagai suatu sistem, (c) memahami perubahan pada setiap bagian berpengaruh kepada keseluruhan organisasi.⁸

Menurut ajaran Islam, orang Islam dianjurkan untuk melakukan segala sesuatu dengan teratur, rapi, benar, dan tertib. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, pekerjaan pengelola sesuatu secara teratur itu merupakan bagian dari ilmu manajemen.⁹ Perhatian Islam terhadap pentingnya manajemen itu menurut Al-Hasyimi sebagaimana dikutip oleh Tanjung dapat dipahami dari hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani, berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْوَجْدِ الْوَجْدِ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْوَجْدِ الْوَجْدِ

Artinya: “sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).”¹⁰

⁸ N. Fattah, *Lndasan Manajemen Pendidikan*, hlm, 15.

⁹ Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 222.

¹⁰ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), hlm. 7.

Praktik manajemen lebih diartikan sebagai tindakan mengatur segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah dibebankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mulyono, hal itu sesuai dengan isyarat yang ditunjukkan dalam QS. Az-Zalzalah [99], ayat: 7-8.

مَنْ عَمِلْ سَاحِئًا وَرَبًّا
مَنْ عَمِلْ سَاحِئًا وَرَبًّا
مَنْ عَمِلْ سَاحِئًا وَرَبًّا
مَنْ عَمِلْ سَاحِئًا وَرَبًّا

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan, meskipun seberat dzarrah, akan dilihatnya (balasan) kebaikan itu. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan meskipun seberat dzarrah akan dilihatnya (balasan)kejahatan itu.”¹¹

Manajemen sebagai suatu ilmu dan teknik untuk mengurus dan mengelola tidak terlepas dari fungsi-fungsi dan kewajiban manusia yang telah ditetapkan Allah SWT, antara lain bahwa manusia berfungsi sebagai khalifah dan manusia berkewajiban mengemban amanat Allah SWT. Dalam ajaran Islam, manajemen memiliki prinsip atau kaidah yaitu:

- a) Prinsip amar ma’ruf nahi munkar, QS. Ali-Imran [3]: 104
- b) Kewajiban menegakkan kebenaran, QS. Al-Israa’[17]: 18 dan Ali Imran [3]: 60
- c) Menegakkan keadilan, QS. An-Nisa’ [4]:58 dan Al-A’raf [7]. 29
- d) Keadilan menyampaikan amanat, QS. An-Nisa [3]: 58 dan Al-Baqaran [2]: 283.

¹¹ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 29.

Dari berbagai pendapat tersebut apabila kita amati lebih jauh ternyata antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain memiliki persamaan makna dan saling melengkapi, maka penulis simpulkan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang menyangkut aspek-aspek yang sistematis, suatu proses kerjasama usaha melalui orang lain, pengaturan, pengarahan, koordinasi, evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan serta dengan memperhatikan sumber dana, alat, metode, waktu dan tempat pelaksanaan.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori manajemen yang dikemukakan oleh Terry, yaitu: *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Sedangkan sebagai pelengkap penulis menambahkan satu lagi teori dari Harold Koontz, yaitu *staffing*. *Staffing* atau penyusunan personalia memiliki hubungan yang sangat erat dengan *organizing* atau pengorganisasian. *Organizing* merupakan penyusunan wadah resmi/legal untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi. Sedangkan *staffing* berhubungan dengan penetapan orang-orang yang akan memangku jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut.

Jadi apabila disusun secara hierarkis, teori manajemen yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*planning*).
- b. Pengorganisasian (*organizing*).
- c. Penyusunan personalia (*staffing*).
- d. Penggerakan (*actuating*).

e. Pengawasan (*controlling*).

2. Prinsip-Prinsip Manajemen.

Keberhasilan sebuah manajemen tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen yang menjadi dasar-dasar dan nilai-nilai pada manajemen itu sendiri. Seorang industrialis asal Perancis, Henry Foyal, menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Ismawanto,¹² bahwa prinsip-prinsip dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah, selanjtnya dijelaskan pula bahwa prinsip-prinsip umum manajemen menurut Henry Foyal adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian kerja (*Devision of work*). Prinsip ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip *the right man in the right place*. Pembagian kerja harus rasional/objektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan atas dasar *like and dislike*. Dengan adanya peinsip *the right man in the right place* akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efiesiensi kerja.
- b. Wewenang dan tanggung jawab (*Authority and responsibility*). Prinsip ini harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang seuai dengan wewenang. Oleh karena itu, makin kecil wewenang makin kecil pula pertanggungjawaban demikian

¹² <http://blogprinsip.blogspot.com/2012/10/prinsip-manajemen-henry-fayol.html> (diakses tanggal 10 Mei 2014).

pula sebaliknya. Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan dan setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban.

- c. Disiplin (*Discipline*). Prinsip ini merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Pemegang wewenang harus dapat menanamkan disiplin terhadap diri sendiri sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang yang adapadanya.
- d. Kesatuan perintah (*Unity of command*). Dalam prinsip ini karyawan harus tahu kepada siapa ia bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik.
- e. Kesatuan pengarahan (*Unity of direction*). Prinsip pelaksanaan kesatuan pengarahan (*Unity of direction*) tidak dapat terlepas dari pembagian kerja (*division of work*). Wewenang dan tanggung jawab (*Authority and responsibility*), Disiplin (*Discipline*), serta kesatuan perintah (*Unity of command*). Oleh karena itu, perlu alur yang jelas darimana karyawan mendapat wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia harus mengetahui batas wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak

terjadi kesalahan. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya.

- f. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Prinsip pengabdian kepentingan pribadi kepada kepentingan organisasi dapat terwujud, apabila setiap karyawan merasa senang dalam bekerja sehingga memiliki disiplin yang tinggi. Setiap karyawan dapat mengabdikan kepentingan pribadi kepada kepentingan organisasi apabila memiliki kesadaran bahwa kepentingan pribadi sebenarnya tergantung kepada berhasil tidaknya kepentingan organisasi.
- g. Penggajian pegawai. Prinsip *more pay for more prestige* (upah lebih untuk prestasi lebih), dan prinsip upah sama untuk prestasi yang sama perlu diterapkan sebab apabila ada perbedaan akan menimbulkan ketidak disiplin dan kemalasan dalam bekerja. Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi yang menentukan tercapainya tujuan dan keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Dalam prinsip penggajian dipikirkan cara agar karyawan dapat bekerja dengan tenang, menimbulkan kedisiplinan dan kegaerahan kerja diantaranya adalah penggajian dengan cara yang adil.
- h. Pemusatan (Centralization). Prinsip pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan kemudian untuk menggunakan wewenang, tetapi untuk menghindari kesimpangsiuran wewenang dan tanggung jawab. Pemusatan wewenang ini juga tidak menghilangkan asas pelimpahan wewenang (*deletion of authority*). Pemusatan wewenang akan

menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Tanggung jawab terakhir terletak pada orang yang memegang wewenang tertinggi atau manajer puncak.

- i. Herarki (tingkatan). Prinsip herarki diukur dari wewenang terbesar yang berada pada menejer puncak dan seterusnya berurutan ke bawah, dengan adanya herarki ini, maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapat perintah. Pembagian kerja menimbulkan adanya bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup luas akan menimbulkan herarki.
- j. Ketertiban (*Order*). Prinsip ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan, baik atasan maupun bawahan mempunyai disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau atau tegang.
- k. Keadilan dan kejujuran Keadilan dan kejujuran terkait dengan moral karyawan dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan mulai dari atasan karena atasan memiliki wewenang yang paling besar. Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- l. Stabilitas kondisi karyawan. Prinsip sebagai makhluk sosial manusia yang berbudaya memiliki keinginan, perasaan dan pikiran. Apabila keinginannya tidak terpenuhi, perasaan tertekan dan pikiran yang kacau

akan menimbulkan guncangan dalam bekerja. Dalam setiap kegiatan kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar. Kestabilan karyawan terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dalam kegiatan.

- n. Prakarsa (*Inisiative*). Pinsip ini mengandung arti menghargai orang lain, karena itu hakikatnya manusia butuh penghargaan. Prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir. Prakarsa menimbulkan kehendak untuk mewujudkan suatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-beiknya. Dalam prakarsa terhimpun kehendak, perasaan, pikiran, keahlian dan pengalaman seseorang. Setiap penolakan terhadap prakarsa karyawan merupakan salah satu langkah untuk menolak gairah kerja. Manajer yang bijak akan menerima dengan senang hari prakarsa-prakarsa yang dilahirkan karyawannya.
- o. Semangat kesatuan dan semangat korps. Prinsip ini akan lahir apabila setiap karyawan mempunyai kesadaran bahwa setiap karyawan berarti bagi karyawan lain dan karyawan lain sangat dibutuhkan oleh dirinya. Manajer yang memiliki kepemimpinan akan mampu melahirkan semangat kesatuan (*esprit de corp*), sedangkan manajer yang suka memaksa dengan cara-cara yang kasar akan melahirkan *friction de corp* (perpecahan dalam korp) dan membawa bencana. Karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib sepenanggungan sehingga menimbulkan semangat kerja sama yang baik.

3. Fungsi-fungsi Manajemen.

Ada beberapa pendapat yang membagi proses kegiatan manajemen. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fidler dikutip oleh Husaini Usman mengenai fungsi manajemen adalah: *planning, organizing, staffing, resourcing, monitoring* dan *controlling, liasing, dan negotiating*, serta *communicating*.¹³

Menurut Husaini Usman, fungsi manajemen adalah:

a) perencanaan, b) pengorganisasian, c) pengarahan (motivasi, kepemimpinan, kekuasaan, pengambilan keputusan, komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, perubahan organisasi, keterampilan interpersonal, membangun kepercayaan, penilaian kerja dan kepuasan kerja), d) pengendalian meliputi pemantauan (*monitoring*), penilaian dan pelaporan.¹⁴

Abdurrahmat Fathoni menyebutkan fungsi manajemen terdiri dari:

a) Perencanaan, b) Pengorganisasian, c) Penggerakan, d) Memberi petunjuk, e) Koordinasi, f) Pengawasan, g) Pelaporan, h) Menggerakkan, i) Evaluasi.¹⁵

Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan bentuk pengawasan pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain meskipun pelaksanaannya dikerjakan oleh unit-unit kerja yang berbeda. Kegiatan-kegiatan tersebut dinamakan sebagai proses manajemen. Kata proses ditambahkan untuk mengartikan kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis dan kegiatan tersebut dilakukan oleh manajer/pimpinan pada semua tingkat.

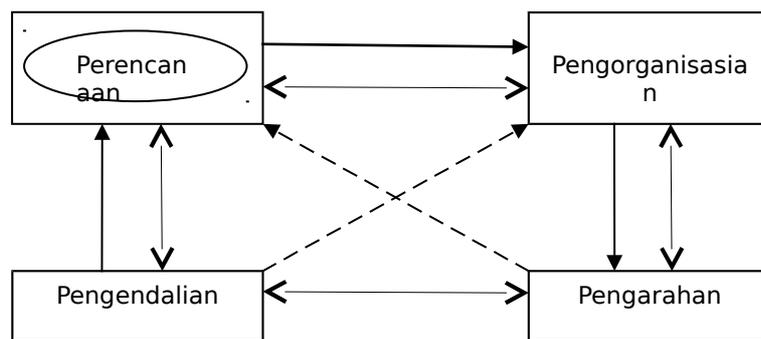
¹³ Husaini Usman, *Manajemen*, hlm. 59

¹⁴ Husaini Usman, *Manajemen*, hlm. 19.

¹⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Manajemen*, hlm.79.

Keempat kerangka tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini, tanda panah tebal menunjukkan urutan kegiatan secara teoritis, dimulai dari perencanaan, kemudian diakhiri pada pengendalian, yang kemudian berputar lagi kembali ke perencanaan. Tanda panah putus-putus menunjukkan urutan yang lebih realistis, yang terjadi di praktik manajemen.¹⁶ Secara visual proses kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Fungsi-Fungsi Manajemen



Dalam beberapa literatur, terdapat perbedaan selain dalam hal langkah-langkah tersebut terdapat pula perbedaan dalam menamakannya sebagai proses manajemen. Akan tetapi hal ini diperjelas oleh Nanang Fattah yang mengatakan bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pemimpin, yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Kepemimpinan (*Leading*), dan Pengawasan (*Controlling*). Oleh karena itu manajemen

¹⁶ Mamduh M, Hanafi, *Manajemen*, (Yogyakarta Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997), hlm. 8-9.

diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.¹⁷

The Liang Gie menamakan langkah-langkah tersebut sebagai fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: perencanaan (*planning*), pembuatan keputusan (*decision making*), pembimbing (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengontrolan (*controlling*), dan penyempurnaan (*improving*).¹⁸ Menurut Geroge R. Terry dalam bukunya *Principles of Managemen* mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan (*actuating*), dan mengawasi (*cotrolling*).¹⁹

Terlepas dari banyaknya pendapat mengenai pembagian fungsi manajemen seperti di atas, pada penelitian ini penulis menggunakan empat fungsi mnjemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan ditambah satu lagi untuk memperkuat yaitu penyusunan personalia karena memiliki hubungan erat dengan pengendalian.

Selanjutnya Soetopo,²⁰ menjabarkan fungsi dan kegiatan manajemen dalam dunia pendidikan sebagai berikut:

¹⁷Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 15.

¹⁸ The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, (Yogyakarta: Nurcahya, 1983), hlm, 61.

¹⁹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hlm. 105.

²⁰ Soetopo, *Manajemen*, hlm. 6-14.

a) Perencanaan (*planning*).

Perencanaan merupakan kegiatan pertama dalam proses manajemen yang akan membahas tentang apa yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan perlu persiapan dan dipikirkan secara intensif. Menurut Arikunto,²¹ perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal.

Menurut Husaini Usman, kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Dari definisi ini perencanaan mengandung unsur-unsur (1) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, (2) adanya proses, (3) hasil yang ingin di capai, dan (4) menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.²²

Sondang P. Siagian, menjelaskan bahwa dalam perencanaan kegiatan dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas lembaga yang menyangkut apa yang harus dikerjakan, mengapa dikerjakan, kapan akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan bagaimana hal tersebut dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan dapat meliputi penentuan tujuan, penegakkan strategi, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan.²³

²¹ Suharsimi Arikunto, Lia Yuliana, *Manajemen*, hlm. 9. Lihat juga, Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 93.

²² Husaini Usman, *Manajemen*, hlm. 77.

²³ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja* (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2002), hlm. 103.

Dengan demikian perencanaan merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan dengan menentukan siapa yang akan terlibat, metode apa yang akan digunakan, dan kapan waktu pelaksanaannya. Hal itu penting untuk dilakukan karena untuk menghindari penyimpang dari tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Perencanaan merupakan suatu proses berpikir yang sistematis dalam menetapkan apa, bagaimana, dan kapan kegiatan-kegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut Sutopo,²⁴ secara sistematis proses berfikir tersebut bertahap dan dapat digambarkan sebagai berikut:

- (1) Tahap pertama: Tujuan Pendidikan yang akan dicapai harus sudah tergambar secara jelas atau secara operasional.
- (2) Tahap kedua: Situasi dan kondisi harus dipelajari yang terdiri dari sumber daya yang dapat dimanfaatkan, kendala dan hambatan yang mungkin timbul, upaya yang dapat dilaksanakan untuk menanggulangnya. Analisa seperti itu dapat dilaksanakan apabila data dan informasi itu dapat dipercaya dan kemampuan menganalisis ikut menentukan kualitas rencana yang akan disusun.
- (3) Tahap ketiga: Berdasarkan hasil analisis tersebut perencanaan harus dapat menemukan berbagai alternatif cara atau metode atau strategi yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- (4) Tahap keempat: Perencanaan harus dapat menentukan alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Bagaimanapun hasil analisisnya keputusan harus diambil, cara, metode, atau strategi mana yang berdaya guna dan berhasil guna dalam proses pencapaian tujuan.
- (5).Tahap kelima: Penyusunan rencana yang meliputi: tujuan yang akan dicapai, metode atau cara atau strategi yang digunakan, sarana dan prasarana yang diperlukan, waktu pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan alat untuk mengevaluasi hasil kegiatannya.

²⁴ Soetopo, *Manajemen*, hlm. 17.

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa proses perencanaan pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan perumusan dan penetapan tujuan pendidikan, analisis situasi dan kondisi, perumusan masalah, identifikasi hambatan, eksplorasi alternatif pemecahan masalah dan kegiatan pencapaian tujuan dan terakhir menetapkan kriteria keberhasilan sebagai ukuran tercapainya tujuan yang sudah direncanakan.

Selanjutnya Soetopo menjabarkan bahwa dalam pencapaian tujuan suatu perencanaan perlu memperhatikan azaz-azaz berikut:

(1) Azaz Komprehensif (menyeluruh) yaitu pemikiran yang berwawasan menyeluruh dalam menganalisis situasi, kondisi dan sumber daya yang ada, kemudian memilih metode atau cara yang akan dipakai, menentukan sarana, dan waktu, (2) Azas Integratif (keterpaduan), yaitu suatu pemikiran atau wawasan yang memperhatikan pengaruh atau keterkaitan faktor-faktor lain non pendidikan. (3) Azas Kontinuitas (kesinambungan) yaitu kesinambungan rencana yang dibuat dengan tingkat situasi dan kondisi yang sudah direncanakan. (4) Azas Praktis atau Visibilitas yaitu suatu pemikiran yang mengutamakan segi praktisnya suatu rencana yang simpel namun tetap mengenai sasaran. (5) Azas fleksibel (lentur) yaitu menyusun suatu rencana yang mudah disesuaikan dengan perubahan atau perkembangan situasi dan kondisi yang ada, tetapi tanpa mengurangi maksud yang hendak dicapainya. (6) Azas berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien) yaitu suatu rencana yang mengacu secara tepat kepada tercapainya tujuan yang diharapkan, dan dapat memanfaatkan sumber-sumber daya secara minimal tetapi hasilnya maksimal.²⁵

Menurut Husaini Usman Perencanaan memiliki tujuan dan manfaat dalam ilmu manajemen. Tujuan perencanaan meliputi:

²⁵ Soetopo, *Manajemen*, hlm. 8-9.

(1) Standar pengawasan yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya, (2) Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu pekerjaan, (3) Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya) baik kualifikasinya maupun kuantitasnya, (4) Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan, (5) Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat tenaga, biaya dan waktu, (6) Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan, (7) menyerasikan dan memadukan beberapa sub-kegiatan, (8) Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui, dan(9) mengarahkan pada pencapaian tujuan.²⁶

Adapun manfaat perencanaan menurut Husaini Usman adalah:

(1) Standar pelaksanaan dan pengawasan, (2) Pemilahan berbagai alternatif terbaik, (3) Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan, (4) Menghemat pemanfaatan organisasi, (5) Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, (6) Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, dan (7) Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti, (8) meningkatkan kinerja.²⁷

Untuk menghasilkan perencanaan yang baik perlu memperhatikan asas-asas berikut ini yaitu: (a) Asas pencapaian tujuan, (b) Asas dukungan data yang akurat, (c) Asas menyeluruh (*comprehensif* dan *integrated*), dan (d) Asas praktis.²⁸ Dalam penyusunan perencanaan, manajer atau perencana perlu memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas tersebut, hal ini menjadi sangat penting karena dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

²⁶ Husaini Usman, *Manajemen Teori*, hlm. 76.

²⁷ Husaini Usman, *Manajemen Teori*, hlm. 76-77.

²⁸ Mulyono, *Manajemen*, hlm. 26-27.

Adapun jenis dan macam perencanaan dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut tinjauan. Bila ditinjau dari sudut waktu pelaksanaan suatu rencana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1) Rencana jangka panjang : 10 – 25 tahun
- (2) Rencana jangka menengah : 5 – 9 tahun
- (3) Rencana jangka pendek : 1 – 4 tahun

Bila ditinjau dari segi telaahnya (pemikirannya) maka jenis perencanaan diklasifikasikan menjadi:

- (1) Perencanaan *strategic* (kebijaksanaan)
- (2) Perencanaan *managerial* (pengarahan pelaksana)
- (3) Perencanaan *operasional* (pelaksanaan teknis).

b) Pengorganisasian (*organizing*).²⁹

Proses kerjasama sekelompok manusia meliputi berbagai jenis kegiatan yang mengacu kepada tercapainya tujuan yang sama. Supaya kegiatan tersebut terpadu, maka kegiatan itu perlu diorganisir. Jadi pada hakekatnya pengorganisasian mencakup menstrukturkan bagian-bagian, membagi-bagi fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan menentukan mekanisme kerja. Dengan demikian maka mengorganisasikan adalah merupakan proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wawanang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

²⁹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Univ. Pend. Indo, *Manajemen*, hlm. 94.

Menurut George R. Terry yang dikutip Mulyono, pengorganisasian adalah:

menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personalia, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.³⁰

Sedangkan pengorganisasian menurut Handoko dalam Husaini Usman, ialah:

(1) penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, (3) penugasan tanggungjawab tertentu, (4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.³¹

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah kegiatan mengatur dan mengalokasikan semua sumber daya dan wewenang kepada orang-orang yang dianggap berkompeten untuk mengefektifkan pencapaian tujuan suatu organisasi.

Ada tiga aktivitas penting yang secara minimal harus diperhatikan dalam pengorganisasian, yaitu: (1) Pembentukan bagian-bagian yang dirancang dalam bentuk struktur, (2) Adanya deskripsi pekerjaan (*job description*) dan analisis tugas (*analysis of duties*), dan (3) Pengaturan mekanisme kerja yang mengatur hubungan antar kaitan bagian-bagian.³²

³⁰ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta; Ar Ruzz Media, 2008), hlm. 27.

³¹ Husaini Usman, *Manajemen Teori*, hlm. 141.

³² Husaini Usman, *Manajemen Teori*, hlm. 49.

Adapun prinsip-prinsip umum organisasi yang dapat dijadikan pedoman yaitu:

(1) Perumusan tujuan yang jelas, (2) Kesatuan komando, (3) Koordinasi antar fungsi, (4) Pengelompokan dan kesinambungan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab, (5) Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dan (6) Ketepatan personil memangku jabatan tertentu.³³

c) Penggerakan (*actuating*)

Penggerakkan itu dimaksudkan agar tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang yang telah di organisasikan berjalan sesuai dengan kebijaksanaan dan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Abdurrahman sebagaimana yang dikutip oleh Soetopo bahwa penggerakan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang mau dan dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya.³⁴

Menggerakkan orang-orang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, untuk itu diperlukan kemampuan atau seni menggerakkan orang lain yang disebut kepemimpinan (*leadership*). Berbagai kegiatan yang dapat dikelompokkan ke dalam fungsi penggerakan ini adalah: pengarahan (*direkting*), koordinasi (*coordinating*), dorongan (*motivating*), memimpin (*leading*).³⁵

Pengarahan (*direkting*) adalah setiap usaha yang dilaksanakan untuk memberikan petunjuk dan menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana melaksanakan fungsi dan tugas, terutama yang ada

³³ Hendyat Sutopo, *Manajemen*, hlm. 45.

³⁴ Hendyat Sutopo, *Manajemen*, hlm. 12.

³⁵ Hendyat Sutopo, *Manajemen*, hlm. 12.

hubungannya dengan kebijaksanaan yang diberikan dalam menghadapi berbagai kemungkinan masalah yang ada. Petunjuk dan penjelasan tersebut diperlukan agar para pelaksana mempunyai persepsi dan wawasan yang tepat, sehingga dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak mengalami hambatan atau terjadi penyimpangan dari arah kebijaksanaan yang telah digariskan.

Koordinasi (*coordinating*) adalah upaya menyatukan atau menyeimbangkan gerak langkah pelaksanaan, fungsi dan tugas dari berbagai unit pelaksana, sehingga pelaksanaannya berjalan harmonis, lancar, tidak bertentangan yang satu dengan yang lain. Hubungan kerja sama yang harmonis diperoleh apabila keterkaitan kerja unit-unit kerja dan kesadaran akan kebersamaan yang dapat menumbuhkan sikap perilaku saling bahu membahu.

Sedangkan dorongan (*motivating*) atau motivasi kerja diperlukan untuk meningkatkan semangat kerja. Kemampuan dan keterampilan kerja yang tinggi tidak dengan sendirinya menghasilkan produktivitas yang tinggi. Kemampuan tersebut perlu disertai dengan kemauan atau semangat kerja yang tinggi, sehingga keaktifitasan kerja para pelaksana berkembang. Mereka tidak hanya bekerja bila ada perintah saja tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kemampuan dan keterampilannya.

Dan memimpin (*leading*) berarti menggerakkan orang lain (guru, karyawan dan siswa) agar dapat melaksanakan fungsi dan

tugasnya. Oleh karena itu kepala sekolah harus dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan perkembangan atau situasi dan kondisi. Keefektifan gaya kepemimpinan tersebut terletak pada relevansi penggunaan (penerapan) gaya kepemimpinan terhadap situasi dan kondisinya.

d) Pengawasan (*controlling*)

Istilah pengawasan dapat mengandung arti beragam, yaitu dapat berarti inspeksi, kontrol dan evaluasi dalam proses manajemen, pengawasan pada hakekatnya adalah suatu aktivitas dalam usaha mengendalikan, menilai dan mengembangkan kegiatan organisasi agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁶ Pengawasan merupakan tindakan atau proses kegiatan untuk mengendalikan pelaksanaan. Kesalahan, kegagalan, dan penyimpangan yang terjadi di lapangan perlu diperbaiki dan dicegah jangan sampai terulang kembali kesalahan-kesalahan tersebut, dan juga menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.

M. Manullang sebagaimana yang dikutip Soetopo mengartikan pengawasan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³⁷ Dan Soetopo juga mengutip pendapat Mondy yang mengartikan “*controlling is the process of comparing actual performance with*

³⁶ Hendyat Sutopo, *Manajemen*, hlm. 76.

³⁷ Hendyat Sutopo, *Manajemen*, hlm. 76.

standards and taking any necessary corrective action".³⁸ Pengawasan adalah proses membandingkan untuk kerja aktual dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengawasan merupakan proses aktifitas, (2) Pengawasan berusaha mengecek, menilai, dan mengoreksi, (3) Kriteria pengecekan adalah rencana, perintah dan prinsip, dan (4) Tujuan pengawasan adalah mengendalikan dan mengembangkan kegiatan organisasi.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan pengawasan adalah *preventif* dan *represif*. *Preventif* mengacu pada pencegahan timbulnya penyimpangan pelaksanaan kerja organisasi dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya. *Represif* berarti bahwa usaha mencapai ketata azasan dan kedisiplinan menjalankan setiap aktivitas agar memiliki kepastian hukum dan menetapkan perbaikan jika terdapat penyimpangan.

Oleh sebab itu, antara perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan yang sangat erat. Koontz dan C.O Donnel mengatakan:³⁹ "*Planning and controlling are the two sides of the same coin*" (perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama). Tanpa pengawasan, penyimpangan akan terus berlangsung dan

³⁸ Hendyat Sutopo, *Manajemen*, hlm. 76.

³⁹ Hendyat Sutopo, *Manajemen*, hlm. 13.

semakin parah, sehingga sulit mengatasinya. Pengawasan yang efektif menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan pengawasan dalam manajemen harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang melandasinya. Prinsip pengawasan yang dimaksud menurut Nuraini,⁴⁰ antara lain:

- (1) Prinsip organisasi, artinya pengawasan harus dilaksanakan dalam kerangka struktur organisasi yang melingkupnya. Misalnya organisasi sekolah, pengawasan dilakukan terhadap jalannya organisasi intern sekolah dan hasil kontrol atau pengawasan itu dilaporkan kepada unit organisasi di atasnya.
- (2) Prinsip perbaikan, artinya pengawasan berusaha mengetahui kelemahan atau kekurangan, kemudian dicari jalan pemecahan agar manajemen dapat berjalan sesuai dengan standard dan organisasi dapat mencapai tujuan.
- (3) Prinsip komunikasi artinya pengawasan dilakukan untuk membina sistem kerjasama antara atasan dan bawahan, membina hubungan baik antara atasan dan bawahan dalam proses pelaksanaan pengelolaan organisasi.
- (4) Prinsip pencegahan, artinya pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengelola komponen-komponen organisasi.
- (5) Prinsip pengendalian artinya pengawasan dilakukan agar semua proses manajemen berada pada rel yang telah digariskan sebelumnya. Dalam hal ini prinsip efisiensi dan efektifitas dalam manajemen menjadi ukuran.
- (6) Prinsip obyektifitas, artinya pengawasan dilakukan berdasarkan data nyata di lapangan, tanpa menggunakan penilaian dan tafsiran subyektif pengawas.
- (7) Prinsip kontinuitas artinya pengawasan dilakukan secara terus menerus, baik selama berlangsungnya proses pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan kerja. Dengan demikian pengawasan dilakukan terhadap proses dan hasil.

B. Nilai-Nilai Keagamaan.

⁴⁰ Nuraini "Manajemen Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Agama" Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), hlm. 63-64.

1. Pengertian Nilai-Nilai Keagamaan.

Nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia atau masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar, dan hal-hal yang dianggap buruk atau salah.⁴¹ Nilai bersifat ideal, abstrak, dan tidak dapat disentuh oleh pancaindra, yang dapat ditangkap hanyalah gejala-gejala yang mewujud dalam barang atau tingkah laku yang mengandung nilai tersebut.

Menurut Sidi Gazalba dalam Chabib Thoha,⁴² nilai adalah suatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda kongkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Chabib Thoha⁴³ menjelaskan, nilai adalah sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subyek yang memberi arti (manusia yang meyakini).

Webster dalam Muhaimin,⁴⁴ menyebutkan: *A value is "a principle, or quality regarded as worth while or desirable"*, yaitu nilai adalah prinsip, standar atau kualitas yang dipandang bermanfaat dan sangat diperlukan. Nilai merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya, atau menilai suatu yang bermakna bagi kehidupannya.

⁴¹Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 79.

⁴² HM Chabib Thoha, *Kapita Selektta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 61.

⁴³ HM Chabib Thoha, *Kapita*, hlm. 61.

⁴⁴ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 148.

Menurut Gordon Allport,⁴⁵ sebagai seorang psikolog memberi penjelasan bahwa nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya, dan nilai yang terjadi pada wilayah psikologis disebut keyakinan. Keyakinan ditetapkan sebagai psikologis yang lebih tinggi dari wilayah lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan dan kebutuhan. Karena itu, keputusan benar-salah, baik buruk, indah tidak indah pada wilayah ini merupakan rangkaian proses psikologis yang kemudian mengarahkan seseorang pada tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan nilai pilihannya.

Menurut Andres A Dananjaya dalam Ndraha, nilai adalah pengertian-pengertian (*conception*) yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, apa yang lebih benar atau kurang benar.⁴⁶ Dalam lingkup yang lebih besar, nilai dapat merujuk kepada sekumpulan kebaikan yang disepakati bersama. Ketika kebaikan itu menjadi aturan atau menjadi kaidah yang dipakai tolok ukur dalam menilai sesuatu, maka itulah yang disebut dengan norma. Jadi nilai adalah harga yang dituju dari suatu perilaku yang sesuai dengan norma yang disepakati.

Zakiah Darajat berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Muhaimin,⁴⁷ bahwa nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus

⁴⁵ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: CV Alfabeta, 2004), hlm. 9.

⁴⁶ Taliziduhu Ndraha, *Teori Budaya Organisasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 29.

⁴⁷ Muhaimin, et. al., *Strategi Belajar Mengajar* (Surabaya: Citra Madina, 1996), hlm. 260.

kepada pola pemikiran perasaan, keterikatan, maupun perilaku. Secara filosofis, nilai sangat terkait dengan masalah etika⁴⁸ yang berhubungan dengan baik dan buruk.⁴⁹ Karena berkaitan dengan masalah etika, maka tolok ukur kebenaran nilai dalam pandangan filsafat adalah aksiologi.⁵⁰

Dalam dimensi aksiologi, nilai dibagi menjadi dua, yakni nilai intrinsik dan nilai instrumental.⁵¹ Nilai intrinsik bersifat mutlak, abadi, dan tidak tergantung dengan kondisi atau situasi tertentu, sedangkan nilai instrumental bersifat relatif. Nilai intrinsik yaitu nilai yang berhubungan dengan baik-buruk sesuatu yang terkandung di dalam sesuatu itu sendiri. Misalnya pisau itu baik karena ketajamannya. Sedangkan dalam dimensi instrumental, pisau bisa menjadi sesuatu yang baik dan juga bisa menjadi sesuatu yang buruk, tergantung penggunaannya. Jika pisau digunakan untuk mengupas buah, untuk menyembelih hewan kurba, ia akan berfungsi baik. Tetapi jika pisau itu digunakan untuk membunuh orang yang tidak berdosa, atau untuk alat kejahatan ia berfungsi buruk.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu prinsip yang diyakini dalam memilih tindakan yang bermakna dalam kehidupannya sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus pada

⁴⁸ Said Agil Husin Al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'an dalam Sistem Pendidikan Islam* (Ciputat: Ciputat Pres, 2005), hlm. 3.

⁴⁹ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 121.

⁵⁰ Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat nilai, yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilosofatan. Salah satu cabang pengetahuan dalam masalah nilai adalah etika, yang bersangkutan dengan masalah kebaikan. Lihat Louis O. Kuttsof, *Pengantar Filsafat*, penerjemah Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 320.

⁵¹ Louis O. Kuttsof, *Pengantar Filsafat*, penerjemah: Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 320.

pola pemikiran, perasaan maupun tingkah laku. Dan untuk mengetahui suatu nilai harus melalui pemaknaan terhadap kenyataan lain yang berupa tindakan, tingkah laku, pola pikir dan sikap.

Setelah memahami tentang nilai, perlu memahami pula tentang makna keagamaan, hal ini karena untuk melengkapi pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan. Secara etimologi, istilah keagamaan itu berasal dari kata “Agama” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” sehingga menjadi keagamaan. Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁵² adalah ajaran, sistem yang mengatur keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.

Menurut Melford E. Sipro dalam Mircea Aliade, et. al., mendefinisikan bahwa agama sebagai sebuah institusi berpola budaya yang berhubungan dengan wujud-wujud supra manusiawi yang dipostulatkan secara budaya.⁵³ Milton Yinger masih dalam Mircea Aliade, et. al., merumuskan agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dan perilaku, yang dengannya sekelompok manusia bergulat dengan problem kehidupan manusiawi yang bersifat ultima.⁵⁴ Clifford Geertz, masih dalam Mircea Aliade, et. al., merumuskan agama sebagai:

- (1) Sebuah system simbol yang berfungsi untuk
- (2) membangun perasaan dan motivasi yang penuh kekuatan, pervasif dan tanpa akhir dalam diri manusia dengan
- (3) merumuskan

⁵² Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 15.

⁵³ Mircea Aliade, et. al., *Metodologi Studi Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 15.

⁵⁴ Mircea Aliade, et. al., *Metodologi*, hlm. 15.

konsep mengenai tatanan umum eksistensi dan (4) membalut konsepsi-konsepsi ini dengan suatu aura faktualitas sehingga (5) perasaan dan motivasi di atas Nampak realistis.⁵⁵

Para ahli antropologi memandang agama sebagai sistem keyakinan yang dapat menjadi bagian dan inti dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi penggerak serta pengontrol bagi anggota masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agamanya.⁵⁶ Pandangan yang hampir sama juga dikemukakan oleh sosiolog Durkheim yang mengartikan agama sebagai suatu sistem kepercayaan yang suci yang mempersatukan para pemeluknya menjadi satu komunitas yang tunggal.⁵⁷

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa agama merupakan sistem keyakinan yang dapat menjadi bagian dan inti dari sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi penggerak serta pengontrol bagi anggota masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agama yang dianutnya.

Pengertian nilai keagamaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat pada beberapa masalah pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga menjadi pedoman bagi tingkah laku warga masyarakat.⁵⁸

⁵⁵ Mircea Aliade, et. al., *Metodologi*, hlm. 15.

⁵⁶ Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 50.

⁵⁷ Ishomuddin, *Pengantar*, hlm. 51.

⁵⁸ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus*, hlm. 963.

Dengan demikian yang dimaksud dengan nilai-nilai keagamaan adalah norma agama yang menjadi peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa “siksa” kelak di akhirat.

Norma agama mempunyai dua macam isi; berwujud perintah yaitu kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu, oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik, dan berwujud larangan yang merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Norma agama yang berasal dari Allah bertujuan untuk mengatur dan menyempurnakan keadaan manusia, agar dalam kehidupannya menjadi manusia yang baik, yaitu manusia yang tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Norma ini tidak ditujukan kepada sikap lahir tetapi pada sikap batin manusia yang diharapkan batin tersebut sesuai dengan norma agama yang ia yakini sebagai sebuah kepercayaan. Norma agama ini hanya memberikan kewajiban kepada manusia tanpa memberi hak kepada mereka, mereka harus mentaati dan melaksanakan norma agama tersebut.

Sedangkan nilai-nilai keagamaan atau yang sering disebut budaya beragama di sekolah merupakan cara berfikir dan cara bertindak warga sekolah yang di dasarkan atas nilai-nilai agama, dan budaya beragama di

sekolah merupakan sekumpulan nilai-nilai agama yang diterapkan di sekolah, yaitu melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah, merupakan perilaku-perilaku atau pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan dalam lingkungan sekolah sebagai salah satu usaha untuk menanamkan akhlak yang baik pada diri anak.

2. Konsep Nilai-Nilai Keagamaan.

Agama sebagai suatu sistem nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat dapat membentuk corak dan dinamika kehidupan bermasyarakat, karena agama dapat menjadi sumber inspirasi, penggerak dan berperan sebagai pengontrol bagi kelangsungan dan ketenteraman hidup suatu kelompok masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lainnya membentuk kelompok-kelompok sosial masyarakat di lingkungan kehidupannya yang masing-masing kelompok memiliki corak dan ciri tersendiri yang membedakan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Keberagamaan atau *religiusitas* seseorang dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan, kapan saja dan di mana saja. Demikian pula di sekolah sebagai lembaga sosial yang di dalamnya terjadi upaya pembiasaan atau pembudayaan terhadap nilai-nilai tertentu, termasuk di dalamnya nilai-nilai agama sebagai acuan moral bagi masyarakat umum. Pembudayaan itu dilakukan melalui proses pembelajaran atau pembimbingan baik yang terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas.

Menurut Ancok,⁵⁹ bahwa aktivitas dalam ajaran Islam bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah) dan yang berkaitan dengan aktifitas yang tampak saja, tetapi juga aktifitas yang tidak tampak yang hanya terjadi di dalam hati seseorang. Karena itulah, keberagamaan seseorang itu meliputi berbagai sisi atau dimensi dalam setiap waktu hidupnya. Islam mendorong pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh/*kaffah*, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 208 dan Adz-Dzariyat [51]: 56.

Menurut Nurcholis Madjid, dalam pandangan Islam agama bukanlah sekedar tindakan-tindakan ritual semata seperti shalat dan berdoa. Agama lebih dari itu, yaitu keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridla dari Allah SWT. Dengan demikian agama meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang mana tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia, berbudi luhur (*al-akhlaq al-karimah*) atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari kemudian.⁶⁰

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan agama tidak terbatas pada mengajarkan segi-segi formalistik belaka. Ritus dan farmalitas agama ibarat bingkai atau kerangka bagi agama. Sebagai bingkai atau kerangka agama, ritus dan formalitas bukanlah tujuan, sebab ritus dan formalitas yang berwujud rukun Islam tersebut akan mempunyai makna yang hakiki apabila dapat menghantarkan orang yang bersangkutan

⁵⁹ Djamaluddin Ancok, *Psikologi Islam, Solusi Islam Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 76.

⁶⁰ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 91.

kepada tujuan yang hakiki pula, yaitu mendekatkan diri kepada Allah (*hablum minallah*) dan berbuat kebaikan kepada sesama manusia (*hablum minan nas*).

Konsep Islam tentang nilai-nilai agama dapat difahami dari doktrin keagamaan. Dalam Islam seseorang diperintahkan untuk beragama atau ber-Islam secara menyeluruh (*kaffah*) (QS. [2]: 208) Setiap muslim baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak, harus ber-Islam. Dalam melakukan aktifitas ekonomi, sosial, politik atau aktifitas apapun, seorang muslim harus melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah dan berkewajiban menyembah Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Adz-Dzariyat [51]: 56.

وَمَا كُنَّا جَاعِلِينَ لِلْجِنِّ وَالنَّاسِ عِبَادًا إِلَّا لِيَتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ هُمْ يُنْفَخُونَ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.⁶¹

3. Wujud dan Peran Nilai-Nilai Keagamaan.

Dalam melaksanakan hukum agama, unsur yang sangat penting untuk membuat orang patuh adalah rasa kerelaan yang penuh dengan kesadaran berdasarkan pilihan sendiri. Manusia tunduk kepada agama adalah karena dorongan taat kepada Allah, karena ia taat kepada Allah, maka ia akan sadar bahwa dalam setiap kehidupannya akan selalu diawasi dan dilihat oleh Allah kendatipun tidak dapat diketahui manusia.

Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa nilai-nilai keagamaan merupakan hal yang mendasar untuk ditanamkan pada anak, dan dalam

⁶¹ Departemen Agama, *Al-Quran*, hlm. 862.

kegiatan menanamkan nilai-nilai inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari pendidikan keagamaan.⁶² Nilai yang timbul dari diri manusia biasanya bersifat subyektif sebagaimana dijelaskan di atas. Sementara itu, Islam mengakui adanya nilai mutlak dan nilai intrinsik yang berfungsi sebagai pusat dan muara semua nilai. Nilai tersebut adalah tauhid (*uluhiyyah* dan *rubuubuyyah*) yang merupakan tujuan semua aktivitas hidup muslim.⁶³

Nilai tauhid itulah yang menjadi tema sentral dalam pendidikan Islam. Nilai itu pulalah yang membedakan antara pendidikan Islam dan non-Islam yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai tolok ukur sebuah nilai.

Nilai-nilai dalam pendidikan Islam menurut Said Agil Munawwar itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi saw., kemudian dikembangkan oleh hasil ijtihad para ulama.⁶⁴ Adapun nilai-nilai keagamaan yang berasal dari budaya masyarakat dianggap sebagai nilai-nilai sangat rentan dan situasional. Oleh karena itu, nilai yang diciptakan oleh manusia bersifat dinamis. Artinya, ideologi dan adat istiadat yang diciptakan manusia bersifat sangat relatif dan bisa berubah sewaktu waktu tergantung kebutuhan (terikat dengan ruang dan waktu). Hal ini berbeda dengan nilai-nilai Ilahi yang bersifat statis (final) dan mutlak tidak akan berubah hingga akhir zaman.

⁶² Nurcholish Majdjid, *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 98-100.

⁶³ Achmadi, *Ideologi*, hlm. 122.

⁶⁴ Said Agil Husin Al-Munawwar, *Aktualisasi*, hlm. 3.

Islam adalah suatu ajaran atau petunjuk hidup yang baik dan benar dari Allah untuk manusia yang disampaikan Rasulullah saw. Dalam ajaran tersebut terkandung nilai-nilai yang mutlak kebenarannya yang sangat dibutuhkan manusia dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.⁶⁵ Sehingga sangat tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa Islam bersifat eksklusif, padahal yang sebenarnya Islam adalah “*Rahmatan Lil ‘Alamin*”.

Hasan Langgulung,⁶⁶ mengklasifikasikan bahwa penghayatan nilai-nilai dalam proses pendidikan Islam mencakup lima kelompok, yaitu: nilai-nilai perorangan (*al-akhlaq al-fardiyyah*), nilai-nilai keluarga (*al-akhlaq al usariyah*), nilai-nilai sosial (*al-akhlaq al-ijtima’iyyah*), nilai-nilai negara (*al-akhlaq al-daulah*), dan nilai-nilai agama (*al-akhlaq al-diniyyah*).

Dalam urusan yang demikian, nilai keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian sistem aturan normatif yang seharusnya dilakukan oleh semua warga sekolah, baik kepala sekolah, dewan guru, tenaga kependidikan, dan seluruh siswa di sekolah tersebut dalam mementingkan pola pikir dan tingkah lakunya dengan merujuk pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunah.

Menurut Muhammad Syaltut sebagaimana dikutip oleh Murtadha Muthahhari,⁶⁷ nilai-nilai ini dapat dijabarkan ke dalam tiga aspek utama

⁶⁵Tim Dosen IAIN Sunan Ampel, *Dasar-Dasar Kependidikan Islam: Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1996), hlm. 128.

⁶⁶ Hasan Langgulung dalam Tim Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Dasar*, hlm. 152.

⁶⁷ Murtadha Mutahhari, *Konsep Pendidikan Islam*, penerjemah: M. Bahrudin (Jakarta: Iqra Kurnia Gemilang, 2005), hlm. 32.

dalam Islam, yaitu akidah atau keyakinan, syariah dan akhlak. Di bidang akidah, nilai itu ditandai dengan pemahaman tentang ajaran-ajaran tauhid atau meng-Esakan Allah, yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam bidang syariah di tandai dengan pemahaman dan pengamalan ajaran hukum syarak, dan dalam akhlak ditandai dengan perilaku keseharian orang yang bersangkutan di tengah komunitas secara luas.

1) Nilai akidah meliputi keyakinan terhadap enam aspek rukun iman, yaitu iman kepada Allah SWT, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Dalam konteks historis, perubahan fundamental yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, adalah akidah. Melalui Al-Quran, Nabi mengubah dimensi akidah dalam jiwa bangsa Arab.⁶⁸

Akidah merupakan fondasi ajaran Islam agar seluruh kehidupan seseorang dapat dimaknai dengan benar. Tujuannyapun jelas karena Allah SWT, bukan karena sesuatu yang bersifat materialistis. Hal ini tercantum dalam UU Sisdiknas Bab II No. 20 Tahun 2003 tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan, yang berbunyi:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ...”⁶⁹

⁶⁸ Lihat M. ‘Utsman Najati, *Al-Quran dan Ilmu Jiwa*, penerjemah: Ahmad Rofi’ Usmani (Bandung: Pustaka, 2004), hlm. 304.

⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Th 2003* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 5.

2) Nilai ibadah, mencakup ibadah langsung kepada Allah (*ibadah mahdah*). Misalnya yang tercakup dalam rukun Islam: salat, zakat, puasa, haji. Mohammad Quthb menjelaskan bahwa bentuk sistem pendidikan Islam yang paling utama adalah ibadah. Ibadah tidaklah sebatas pada amal ibadah yang sudah dikenal dan dilaksanakan, tetapi lebih luas pengertiannya daripada itu. Yaitu kebaktian, yang hanya ditujukan kepada Allah SWT, mengambil petunjuk hanya dari Allah SWT saja tentang segala persoalan dunia dan akhirat, dan kemudian mengadakan hubungan yang terus menerus dengan Allah tentang semuanya itu.⁷⁰

Jadi, intinya yaitu ibadah tidak hanya terbatas pada rukun Islam semata, tetapi juga seluruh aspek kehidupan yang terejawantah dalam perilaku sehari-hari yang dilaksanakan atas dasar akidah yang benar. Oleh karena itu, ibadah hanya mempunyai nilai bila ibadah menjadi jalan hidup (*way of life*) setiap individu.

3) Nilai akhlak, mencakup seluruh perbuatan manusia sehari-hari. Misalnya, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang lain, dan akhlak terhadap alam semesta. Menurut Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibani, tingkat akhlak berada di bawah akidah dan ibadah. akhlak merupakan buah dari akidah dan ibadah yang benar.⁷¹

⁷⁰Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, penerjemah: Salman Harun (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 48-49.

⁷¹Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam*, penerjemah: Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 312.

Namun demikian, akhlak bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai syarat sempurnanya iman dan ibadah.

Di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa setiap proses keimanan dan peribadatan selalu dihubungkan dengan akhlak. Shalat dihubungkan dengan pencegahan tindakan keji dan munkar. QS. Al-'Ankabut [29]: 45. Puasa diwajibkan untuk melatih orang agar menjadi orang yang bertakwa. QS. Al-Baqarah [2]: 183. Haji dilakukan dengan memelihara akhlak. Oleh karena itu, akidah dan ibadah belum sempurna jika tidak disertai akhlak yang baik.

Menurut Gay Hendricks dan Kate Ludeman dalam Ari Ginanjar, menjelaskan bahwa terdapat beberapa nilai keagamaan yang tampak dalam diri seseorang dalam menjalankan tugasnya, di antaranya:

- 1) Kejujuran. Rahasia untuk meraih sukses menurut mereka adalah dengan selalu melakukan kejujuran.
- 2) Keadilan. Salah satu skill seseorang yang religius adalah mampu bersikap adil kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun.
- 3) Bermanfaat bagi orang Lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang tampak dari diri seseorang.
- 4) Rendah Hati. Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong mau mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan gagasan atau kehendaknya.
- 5) Bekerja Efisien. Mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka pada pekerjaan saat itu, dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan selanjutnya.
- 6) Visi ke Depan. Mereka mampu mengajak orang ke dalam angan-angannya. kemudian menjabarkan begitu terinci, cara-cara untuk menuju kesana.
- 7) Disiplin Tinggi. Mereka sangatlah disiplin. Kedisiplinan mereka tumbuh dari semangat penuh gairah dan kesadaran, bukan berangkat dari keharusan dan keterpaksaan.

- 8) Keseimbangan. Seseorang yang memiliki sifat beragama sangat menjaga keseimbangan hidupnya.⁷²

Dalam konteks pembelajaran, beberapa nilai agama tersebut bukan tanggung jawab guru agama semata. Kejujuran tidak hanya disampaikan lewat mata pelajaran agama saja, tetapi juga lewat mata pelajaran lainnya. Misalnya seorang guru matematika mengajarkan kejujuran lewat rumus-rumus pasti yang menggambarkan suatu kondisi yang tidak kurang dan tidak lebih atau apa adanya. Begitu juga seorang guru ekonomi bisa menanamkan nilai-nilai keadilan lewat pelajaran ekonomi.

C. Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan di Sekolah

Istilah pengembangan dapat bermakna kuantitatif dan kualitatif.⁷³ Secara kuantitatif, bagaimana menjadikan pendidikan agama Islam yang hanya dua jam pelajaran itu (Kurikulum 2004) dapat lebih meluas dan merata pengaruhnya baik di dalam maupun di luar sekolah. Secara kualitatif bagaimana menyediakan pendidikan agama Islam menjadi lebih baik, bermutu dan lebih maju sejalan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri yang selalu berada di depan dalam merespon dan mengantisipasi berbagai tantangan hidup dan kehidupan.

Nilai-nilai keagamaan dalam hal ini adalah nilai-nilai Islami yang dilaksanakan di sekolah oleh semua warga sekolah baik kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh siswa di sekolah. Sedangkan yang

⁷² Ari Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power, Sebuah Inner Journey Melalui Ikhsan* (Jakarta: Arga, 2003), hlm. 249.

⁷³ Muhaimin, *Rekonstruksi*, hlm. 307.

dimaksud dengan pengembangan nilai-nilai Islami adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan Hadits.⁷⁴

Agama dipandang sebagai sumber nilai karena agama berbicara baik dan buruk, benar dan salah. Demikian pula agama Islam memuat ajaran normatif yang berbicara tentang kebaikan yang seyogyanya dilakukan manusia dengan subyek yang paling peting di muka bumi sebagaimana diungkapkan dalam QS. Al-Jaatsiyah [45]:13.

وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكَ الْوَحْيُ
وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكَ الْوَحْيُ

Artinya: “dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁷⁵

Manusia diperintahkan untuk menerima dengan tidak ragu-ragu mengenai kebenaran nilai itu, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 147.

وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكَ الْوَحْيُ
وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكَ الْوَحْيُ

Artinya: “kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu”.⁷⁶

⁷⁴ Muslimin, *Pengembangan Nilai-nilai Islam dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, www.sutris02.wordpress.com (diakses tanggal 21 April 2014), hlm. 3.

⁷⁵ Departeman Agama, *Al-Quran*, hlm. 816.

⁷⁶ Departeman Agama, *Al-Quran*, hlm. 37.

Nilai-nilai Islami yang dapat dikembangkan di sekolah adalah nilai dalam perspektif Islam yang dapat berupa kebaikan yang ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunah, seperti halnya tentang akhlak, silaturahmi, infak, kebersihan, memperbanyak membaca Al-Quran, shalat berjama'ah, tolong menolong dalam kebaikan dan lain sebagainya.

Aktualisasi nilai-nilai agama di sekolah menjadi sangat penting terutama dalam memberikan isi dan makna kepada nilai moral, dan norma masyarakat. Aktualisasi nilai dilakukan dengan mengartikulasikan nilai-nilai ibadah yang bersifat ritual menjadi aktifitas dan perilaku moral sivitas akademika sekolah sebagai bentuk dari kesalehan sosial. Nilai-nilai Islam bisa masuk dalam kegiatan di sekolah dengan mengembangkan "budaya Islami", yaitu memindahkan nilai-nilai Islam yang ada di masyarakat ke dalam budaya sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas, nilai-nilai keagamaan yang sudah menjadi budaya di sekolah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mentransfer nilai-nilai keagamaan yang ada di masyarakat Islam menjadi pola nilai-nilai, norma, sikap ritual, kebiasaan-kebiasaan yang dibangun di lingkungan sekolah secara Islami. Seperti menyiapkan peserta didik mengenal, memahami, menhayati, hingga mengimani, bertaqwa serta berakhlak mulia melalui pembelajaran agama dari sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadits.

1. Manajemen Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan di Sekolah.

Menurut Toto Tasmara,⁷⁷ kepala sekolah sebagai seorang pemimpin seyogyanya memiliki kematangan spiritual. Karena seseorang yang memiliki kematangan spiritual, dunia merupakan lahan menanam benih kebaikan yang kelak akan dipanen di akhirat. Mempunyai orientasi kasih sayang pada sesama manusia dan makhluk Allah yang lain. Bagi mereka kehadiran orang lain merupakan berkah Ilahi yang harus dijaga dan dihormati. Bukan hanya hubungan sosial, tetapi lebih jauh lagi menjadi hubungan yang terkait pada hubungan emosional spiritual yang berlimpahkan kasih sayang, saling menghormati. Kehadiran orang lain merupakan eksistensi dirinya, tanpa kehadiran orang lain mereka tidak mempunyai potensi untuk melaksanakan cinta kasihnya pada agama.

Dalam konteks pendidikan agama ada yang bersifat vertikal dan horisontal. Yang vertikal wujud hubungan manusia atau warga sekolah dengan Allah (*hablum minallah*), misalnya shalat, berdoa, puasa, dan lainnya. Sedangkan yang horisontal berwujud hubungan manusia dengan sesama manusia atau antar warga sekolah (*hablum minan nas*), dan hubungan mereka dengan lingkungan sekitarnya.⁷⁸

Semuanya itu adalah nilai-nilai keagamaan yang diwujudkan melalui pembiasaan, keteladanan, kemitraan dan internalisasi.

1) Strategi Pembiasaan.

⁷⁷ Toto Tasmara, *Spiritual Contered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spiritual* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 6.

⁷⁸ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 106-107.

Secara etimologi, pembiasaan berasal dari kata “biasa”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, biasa adalah: a) lazim atau umum, b) seperti sedia kala, c) sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan prefiks “pe” dan sufiks “an” menunjuk arti proses.⁷⁹ Dengan demikian pembiasaan merupakan proses pembuatan seseorang menjadi terbiasa.

Pembiasaan adalah salah satu model yang sangat penting dalam pelaksanaan penanaman nilai-nilai keagamaan. Seorang yang mempunyai kebiasaan tertentu dapat melaksanakannya dengan mudah dan senang hati. Bahkan, segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam usia muda sulit untuk diubah dan tetap berlangsung sampai tua. Untuk mengubahnya sering kali diperlukan terapi dan pengendalian diri yang serius.

Bagi para orang tua dan guru, pembiasaan hendaknya disertai dengan usaha membangkitkan kesadaran atau pengertian terus menerus akan maksud dari tingkah laku yang dibiasakan. Sebab, pembiasaan digunakan bukan untuk memaksa peserta didik agar melakukan sesuatu secara otomatis seperti robot, melainkan agar ia dapat melaksanakan segala kebaikan dengan mudah tanpa merasa susah atau berat hati..

2) Strategi Keteladanan.

⁷⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 129.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “keteladanan” dasar katanya adalah “teladan” yaitu perbuatan atau barang, yang patut ditiru dan dicontoh.⁸⁰ Oleh karena itu “keteladanan” adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Dalam bahasa arab “keteladanan” diungkapkan dengan kata “uswah” yang memiliki persamaan arti dengan kata “qudwah”.⁸¹ Dengan demikian keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh oleh seseorang dari orang lain. Namun keteladanan yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik, sesuai dengan pengertian “uswah”.

Pendidikan dengan teladan berarti pendidikan dengan memberi contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berfikir dan sebagainya. Model keteladanan sebagai pendekatan digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang baik kepada siswa atau warga sekolah agar mereka dapat berkembang dengan baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar. Keteladanan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan ibadah, akhlak, kesenian dan lain-lain.

Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan tentang keteladanan dalam pendidikan, di antaranya QS Al-Ahzab [33]: 21

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالصَّلَاةَ إِحْسَانًا وَقُلُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

⁸⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar*, hlm. 1025.

⁸¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 25.

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah SAW. itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”⁸²

Telah diakui bahwa kepribadian Rasulullah SAW dalam keteladanan adalah buat seluruh manusia dan generasi. Teladan yang abadi dan tidak akan habis adalah kepribadian Rasul SAW yang di dalamnya terdapat segala norma, nilai dan ajaran Islam.

Menurut Saeful Bahri dalam model keteladanan terdapat keuntungan dan kelebihan antara lain:

- a) akan memudahkan dalam menerapkan ilmu yang dipelajari.
- b) akan memudahkan guru dalam mengevaluasi hasil belajarnya.
- c) agar tujuan pendidikan lebih terarah dan tercapai dengan baik.
- d) bila keteladanan dalam lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat yang baik, maka akan tercapai situasi yang baik.
- e) tercipta hubungan harmonis antara guru dan siswa.
- f) secara tidak langsung guru dapat menerapkan ilmu yang diajarkannya.
- g) mendorong guru untuk selalu berbuat baik karena akan dicontoh oleh siswanya.⁸³

3) Strategi Kemitraan.

Strategi kemitraan/kepercayaan, harapan dari orang tua atau lingkungan sekitar, pengamalan agama perlu ditingkatkan sehingga memberikan motivasi serta berpartisipasi dalam model pelaksanaan

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 420.

⁸³ Saeful Bahri “Strategi Kepala Sekolah dalam Membangun Budaya Religius di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ngawi” (Tesis) (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), hlm. 48, http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=08710046, (diakses 6 Juni 2014).

nilai-nilai keagamaan. Tidak mungkin berhasil maksimal pelaksanaan nilai-nilai keagamaan bagi warga sekolah tanpa dukungan dari pihak luar/keluarga siswa. Hubungan kemitraan yang harmonis tetap dipelihara yang diwujudkan dalam bentuk:

- a) adanya saling pengertian, untuk tidak saling mendominasi.
- b) adanya saling menerima, untuk tidak saling berjalan menurut kemauannya sendiri-sendiri.
- c) adanya saling percaya, untuk tidak saling curiga mencurigai.
- d) saling menghargai, untuk tidak saling *truth claim* (klaim kebenaran).
- e) saling kasih sayang, untuk tidak saling membenci dan iri hati.⁸⁴

2. Bentuk Nilai-Nilai Keagamaan di Sekolah

Banyak sekali nilai-nilai keagamaan yang harus dibangun di sekolah. Sekolah adalah ibarat tanah yang subur tempat menanam benih-benih nilai-nilai keagamaan tersebut. Adapun nilai-nilai keagamaan yang harus ditanam di sekolah adalah:

a. Nilai Etika.

Etika merupakan perilaku, adat istiadat atau kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti norma-norma, nilai-nilai kaidah-kaidah dan

⁸⁴ Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam, Pemberdayaan Pengembangan Kurikulum hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan* (Bandung: Nuansa, 2003), hlm. 22.

Artinya: “Tidak (sempurna) iman seseorang kamu, sebelum ia menyukai untuk saudaranya (sesama Islam) apa yang disukainya untuk dirinya sendiri.”⁸⁸

d). Nilai Bertanggung Jawab.

Bahwa semua hak itu berasal dari kewajiban yang telah dilaksanakan dengan baik. Itulah sebabnya maka kita harus memupuk rasa tanggung jawab sejak dini di lembaga pendidikan sekolah, bahkan sejak dari keluarga. Tanggung jawab merupakan akhlak mulia sebagai wujud orang yang beriman kepada Allah SWT yang selalu menjaga amanat yang diberikannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Muddatstsir [74]: 38

وَمَا مِنْ نَفْسٍ إِلَّا عِنْدَ رَبِّهَا كَنزٌ

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”⁸⁹

e) Nilai menghormati hukum dan peraturan.

Yaitu dengan menghormati hukum dan peraturan atas dasar kesadaran bahwa hukum dan peraturan itu adalah kita buat untuk kebaikan hidup kita. Firman Allah dalam QS. An-Nisaa’ [4]: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أَهْلَ بَيْتِ آلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ ذَلِكَ لَعَبْرَةٌ لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ

⁸⁸ Al-Imam Al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, penerjemah: Zaenuddin Hamidy dkk., (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009), hlm. 17.

⁸⁹ Departemen Agama, *Al-Quran*, hlm. 995.

Semua nilai agama yang disebutkan di depan menjadi pedoman dalam menyikapi segala sesuatu bagi kehidupan manusia, baik menyikapi keberhasilan maupun kegagalan, kenikmatan maupun kesengsaraan, termasuk menyikapi ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut akan dirinci beberapa indikator perkembangan nilai-nilai Islam peserta didik:

Tabel 2.1
Indikator Perkembangan Nilai-Nilai Islam Peserta Didik.⁹³

Bentuk Nilai	Indikator
Ibadah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan salat jama'ah setiap waktu salat tiba. 2. Melaksanakan salat sunnah secara rutin. 3. Melakukan tadarus Al-Quran secara istiqomah. 4. Membaca doa sebelum aktifitas. 5. Berwudlu sebelum melakukan aktifitas.
Akidah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dzikir setiap selesai shalat. 2. Membaca sholawat secara rutin. 3. Melaksanakan mujahadah.
Akhlak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menutup aurat setiap waktu. 2. Berjabat tangan ketika bertemu orang lain (sejenis). 3. Mengucap salam ketika bertemu orang lain. 4. Bersikap lemah lembut terhadap orang lain. 5. Menepati janji jika berjanji. 6. Tidak mendiskriminasikan orang lain, meskipun berbeda agama. 7. Bersikap jujur. 8. Meminta izi kepada orang tua/guru atau yang dituakan ketikan akan bepergian. 9. Tidak mengganggu orang lain. 10. Menyingkirkan benda/sesuatu yang mengganggu di jalan. 11. Ikhlas dalam membantu siapa saja terutama orang tua. 12. Ikhlas menerima keadaan orang tua. 13. Menjenguk orang lain yang sakit.

⁹³ Indikator-indikator tersebut diadopsi dari Ahmad Izzuddin al-Bayani, "Minhaj at-Tarbiyah as-Saliyah" dalam Yusuf Muhammad al-Hasan *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan al-Sofwa, 1997), hlm. 34-37.

	14. Melakukan silaturahmi. 15. Menolong orang yang berada dalam kesusahan. 16. Mau meminjamkan sesuatu bila orang lain membutuhkan. 17. Memaafkan kesalahan orang lain. 18. Mematuhi segala peraturan. 19. Bertanggung jawab atas segala tugas yang dibebankan. 20. Menjaga kebersihan lingkungan.
Syari'ah	1. Meninggalkan praktik riba. 2. Tidak memakan dan minum segala sesuatu yang diharamkan.

3. Model Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan di Sekolah.

Pengembangan nilai-nilai keagamaan di sekolah dapat dilakukan dengan beberapa model. Model pengembangan merupakan sesuatu yang dianggap benar, tetapi bersifat kondisional. Oleh karena itu, model pengembangan nilai-nilai keagamaan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tempat model ini akan diterapkan beserta penerapan nilai-nilai yang mendasarinya.

Menurut Muhaimin, ada empat model pengembangan budaya agama di komunitas sekolah, yaitu:

- 1) *model struktural*, yang didasari oleh inisiatif pemimpin atau pejabat sehingga bersifat “*topdown*.”
- 2) *model farmal*, menggunakan pendekatan yang normatif, doktriner, dan absolutis. Model formal biasanya digunakan dalam pengembangan budaya agama di pondok pesantren.
- 3) *model mekanik*, pengembangan budaya agama yang lebih menonjolkan fungsi moral dan spiritual atau dimensi afektif dari pada kognitif dan psikomotor. Artinya dimensi kognitif dan psikomotor diarahkan untuk pembinaan afektif (moral dan spiritual), model mekanik ini seperti pengembangan PAI pada sekolah-sekolah umum.
- 4) *model organik*, berusaha mengembangkan pandangan hidup yang dibangun dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pokok kemudian bersedia menerima kontribusi pemikiran dari

para ahli dengan mempertimbangkan konteks historis dan nilai-nilai Ilahi/ wahyu sebagai sumber konsultasi yang bijaksana.⁹⁴

Adapun strategi untuk membudayakan nilai-nilai agama di sekolah menurut Muhaimin, dapat dilakukan melalui:

- 1) *power strategy*, yakni strategi pembudayaan agama di sekolah dengan cara menggunakan kekuasaan atau melalui *people's power*, dalam hal ini peran kepala sekolah dengan segala kekuasaan sangat dominan dalam melakukan perubahan.
- 2) *persuasive strategy*, yang dijalankan lewat pembentukan opini dan pandangan masyarakat atau warga sekolah.
- 3) *normative re-educative*, pendidikan ulang untuk menanam dan mengganti paradigma masyarakat sekolah yang lama dengan yang baru.⁹⁵

Sedangkan strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan di sekolah meniscayakan adanya upaya pengembangan dalam tiga tataran yaitu: tataran nilai yang dianut, tataran praktik keseharian, dan tataran simbol-simbol budaya.⁹⁶ Pada tataran nilai yang dianut, perlu dirumuskan secara bersama nilai-nilai agama yang perlu disepakati dan perlu dikembangkan di sekolah, untuk selanjutnya dibangun komitmen dan kesepakatan bersama di antara warga sekolah.

Dalam tataran praktik keseharian, nilai-nilai keagamaan yang telah disepakati tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh semua warga sekolah. Proses pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: *Pertama*, sosialisasi nilai-nilai agama yang disepakati sebagai sikap dan perilaku ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang. *Kedua*, penetapan *action plan* mingguan atau

⁹⁴ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 305-307.

⁹⁵ Muhaimin, *Rekonstruksi*, hlm.328.

⁹⁶ Muhaimin, *Rekonstruksi*, hlm.325.

bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang dilakukan oleh semua pihak dalam mewujudkan nilai-nilai agama yang telah disepakati. *Ketiga*, pemberian penghargaan terhadap prestasi warga sekolah sebagai usaha pembiasaan (*habit formation*) yang menunjang sikap dan perilaku yang komitmen dan loyal terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang disepakati.

Menurut Tafsir, strategi yang dapat dilakukan oleh para praktisi pendidikan untuk membentuk budaya agama di sekolah, adalah:

- 1) memberi contoh teladan.
- 2) membiasakan hal-hal yang baik.
- 3) menegakkan disiplin.
- 4) memberikan motivasi dan dorongan.
- 5) memberikan hadiah terutama psikologis.
- 6) menghukum (dalam rangka kedisiplinan).
- 7) pembudayaan agama yang berpengaruh bagi pertumbuhan anak.⁹⁷

Pengembangan nilai-nilai keagamaan yang bersifat vertikal dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan membaca Al-Quran dan Asmaul Husna sebelum mulai pelajaran, shalat berjamaah, puasa hari Senin dan Kamis, berdoa bersama, menegakkan komitmen dan loyalitas terhadap kegiatan sekolah, dan lain-lain. Pengembangan nilai-nilai keagamaan yang bersifat horisontal lebih mendudukan sekolah sebagai institusi sosial, yang jika dilihat dari struktur hubungan antar manusianya diklasifikasikan ke dalam tiga hubungan yaitu: 1) hubungan atasan bawahan, 2) hubungan professional, dan 3) hubungan sederajat atau suka rela.⁹⁸

⁹⁷ Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 112.

⁹⁸ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum*, hlm. 62-63.

Hubungan atasan bawahan, mengandalkan perlunya kepatuhan dan loyalitas para tenaga kependidikan/guru terhadap atasannya. Hubungan profesional, mengandalkan perlunya pengembangan hubungan yang rasional, kritis dan dinamis antar sesama guru atau antara guru dan pimpinannya dan atau peserta didik dengan guru dan pimpinannya untuk saling berdiskusi dalam meningkatkan kualitas profesionalisme dan pelayanan kepada siswa. Sedangkan hubungan sederajat atau sukarela, merupakan hubungan manusiawi antara teman sejawat untuk saling membantu, mendoakan, mengingatkan dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Adapun pengembangan nilai-nilai keagamaan yang menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan atau alam sekitarnya dapat diwujudkan dalam bentuk membangun suasana atau iklim yang kondusif, dengan komitmen menjaga dan memelihara berbagai fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah, seperti menjaga dan memelihara kelestarian, kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkungan sekolah, dan semua itu menjadi tanggung jawab bersama sebagai upaya dalam mengembangkan nilai-nilai keagamaan di sekolah.